

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Pembangunan Pendidikan Dengan Meninjau Ketersediaan Sarana Prasarana Serta Tenaga Didik Di Indonesia Timur

Firyal Alifah Hisanah ^a, Hacnes Dwi Kristina Tiya Rahayu ^b, Jessica Agatha Rochella Sirait ^c, Rahmah Futikhatin Nur ^d, Sendy Yanuarsyah ^e.

^{a,b,c,d} Politeknik STIA-LAN Bandung

e-mail : ^a firyalalifahhisanah30@gmail.com, ^b hacnestiya@gmail.com,

^c jessicaagt02@gmail.com, ^d rahmahfutikhatin21@gmail.com,

^e sendyy2101@gmail.com.

Abstrak

Artikel ini menganalisis mengenai permasalahan pendidikan yang ada di Provinsi Papua, terutama dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana serta tenaga didiknya. Pendidikan adalah salah satu aspek pendukung dalam pembangunan bangsa. Penentu dari sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran selain input dari siswa, juga dapat ditentukan dari aspek guru atau tenaga didik. Melihat dari angka rendahnya akses Pendidikan di Papua yang ditandai dengan semakin tingginya angka putus sekolah yang mencapai 1,83 dari nomor dua di Indonesia dan terjadi pada usia 7-24 tahun di provinsi papua, BPS juga mencatat bahwa 11,89% mengalami putus sekolah. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi pembangunan pendidikan di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan mendasarkan kemudian menjabarkan pandangan yang ada artikel ini pada tulisan para ahli. Hasil dari penelitian ini berupa alternatif yaitu program percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mencakup antara lain sarana prasarana dengan membangun akses jalan agar tidak ada keterbatasan dalam hal jangkauan lokasi lagi, kekurangan guru dengan memfasilitasi tenaga didik yang ditugaskan dengan fasilitas yang layak agar menjamin keberlangsungan hidupnya selama menjalankan tugas, maupun hal lain yang belum memadai.

Kata Kunci: pendidikan; papua; sarana dan prasarana; tenaga didik

Development of Education by Reviewing the Availability of Infrastructure Facilities and Students in Eastern Indonesia

Abstract

This article analyzes the educational problems that exist in Papua Province, especially in terms of the availability of facilities and infrastructure as well as the teaching staff. Education is one of the supporting aspects in nation building. Determinants of a success in the learning process in addition to input from students, can also be determined from the aspect of teachers or students. Looking at the low rate of access to education in Papua, which is marked by the higher dropout rate, which reached 1.83 from number two in Indonesia and occurred at the age of 7-24 years in Papua province, BPS also noted that 11.89% had dropped out of school. The purpose of writing this article is to find out the alternatives that can be done to overcome the development of education in Papua. The method used in this study is a descriptive qualitative method by basing and then describing the views of this article on the writings of experts. The results of this study are alternatives, namely the program to accelerate development

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

and improve the quality of human resources (HR) which include, among others, infrastructure by building access roads so that there are no limitations in terms of location range anymore, teacher shortages by facilitating students who are assigned with facilities that appropriate in order to ensure their survival while carrying out their duties, as well as other things that are not adequate.

Keywords: *education; papuans; facilities and infrastructure; educators*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu aspek pendukung dalam pembangunan bangsa. Penentu dari sebuah keberhasilan dalam proses pembelajaran selain input dari siswa, juga dapat ditentukan dari aspek guru atau tenaga didik. Pendidikan merupakan sarana yang dapat di gunakan untuk meningkatkan kualitas terutama dalam kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan mengantarkan suatu bangsa dalam mencapai kemakmuran. Kehadiran dari para tenaga didik diharapkan mampu memberikan perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran di suatu daerah. Seperti yang kita ketahui, pendidikan di Papua sangat tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya. Baik dari capaian pembelajaran maupun sarana dan prasarana yang menunjang pendidikan di Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, Indeks Pengembangan Manusia maupun Indeks Pengembangan Teknologi di wilayah Papua secara konsisten merupakan salah satu yang terendah di Indonesia. Menurut BPS IPM Provinsi Papua pada 2019 merupakan yang terendah dengan poin sebesar 60,84 dan di susul oleh IPM Provinsi Papua Barat dengan poin 64,70 (Hermansyah et al., 2020).

Rendahnya akses Pendidikan di Papua ditandai dengan adanya semakin tingginya angka putus sekolah yang mencapai 1,83 dari nomor dua di Indonesia dan terjadi pada usia 7-24 tahun di provinsi Papua, BPS juga mencatat bahwa 11,89% mengalami putus sekolah (Kemendikbud, 2018).

Sebenarnya kunci masalah terletak pada minimnya tenaga didik dan sarana prasarana yang menunjang pendidikan di Papua, sehingga hal tersebut mengabaikan cukup banyak anak di Papua tidak bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik, yang akan menimbulkan berbagai permasalahan yang lain seperti rendahnya angka lama sekolah serta angka melek huruf di Papua, masih tingginya angka tuna aksara atau buta aksara (Yeimo, 2017). Sehubungan dengan adanya permasalahan tersebut, maka artikel ini ditulis

untuk menganalisis alternatif yang dapat dilakukan untuk mendukung pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.

B. PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang berlandaskan pada tulisan para ahli dalam bidang pendidikan, mencoba menjabarkan permasalahan pendidikan dasar yang ada di Provinsi Papua terutama dalam hal sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga didik yang ada.

Kondisi Pendidikan di Indonesia

Jika kita lihat, kondisi Pendidikan di Indonesia masih saja memprihatinkan baik dari segi sarana maupun prasarana, bahkan di daerah-daerah yang jauh dari Ibukota ada bangunan sekolah yang tidak layak digunakan, hal ini terjadi karena pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi secara maksimal. Selain sarana dan prasarana ada juga sistem yang dianut di Indonesia yaitu sistem Pendidikan Nasional.

Tujuan dari sistem pendidikan nasional berdasarkan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, tujuan tersebut belum mencapai sasaran yang ditetapkan pemerintah melalui program-program pendidikan setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih harus ditingkatkan (Pribadi, 2017).

Dalam pembangunan infrastruktur, sarjana dari pendidikan akademik maupun vokasi sangat diperlukan untuk mendukung setiap tahapan pembangunan. Dari dulu hingga sekarang permasalahan infrastruktur ini masih menjadi masalah utama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum menerima bantuan untuk perbaikan sedangkan proses perbaikan dan pembangunan sekolah yang rusak atau tidak layak dilakukan secara sporadis sehingga tidak kunjung selesai (Pribadi, 2017).

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Kondisi Pendidikan di Papua

Pelaksanaan Pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Papua masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses sekolah yang baik. Kondisi ekonomi, budaya dan aksesibilitas geografis menjadi batasan bagi banyak anak-anak di wilayah timur Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dasar sekalipun. Masih banyak masyarakat yang belum peduli dengan pentingnya pendidikan untuk anak-anak. Atau, banyak yang mengalami kesulitan ekonomi sehingga tak mampu menyekolahkan anak-anak mereka (*Laporan Kunjungan Kerja Komisi I*, 2016).

Data BPS menyebutkan, Papua Barat dan Papua memiliki nilai paling rendah di antara seluruh provinsi di Indonesia, dalam laporan Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index (HDI) 2010-2015. Papua Barat memiliki nilai 61,73, sedangkan Papua memiliki nilai 57,25. Banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena mereka harus bekerja demi menunjang ekonomi keluarga. Data dari United Nations Children's Fund (Unicef) menunjukkan bahwa 30% siswa Papua tidak menyelesaikan SD dan SMP mereka. Di pedalaman, sekitar 50% siswa SD dan 73% siswa SMP memilih untuk putus sekolah (*Laporan Kunjungan Kerja Komisi I*, 2016).

Pembangunan bidang pendidikan di Papua tidak bisa dilaksanakan dengan cara biasa seperti yang dilakukan di daerah lain di Indonesia. Arah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah saat ini dengan mendorong percepatan penuntasan wajib belajar sembilan tahun, pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikan, serta pengembangan model sekolah yang adaptif, memerlukan komitmen kuat dari pemerintah, penyelenggara pendidikan, orang tua, dan masyarakat (Pribadi, 2017).

Permasalahan Pendidikan di Papua

Selama lebih dari satu dekade, Indonesia telah mencoba memperbaiki sistem pendidikannya dengan mengalokasikan 20% dari APBN untuk bidang pendidikan (Pribadi, 2017). Sistem

pendidikan di Indonesia bagian Barat secara umum lebih baik dari Indonesia bagian Timur, seperti Papua. Di Indonesia Timur, masih banyak anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah yang baik. Angka kelulusan jenjang pendidikan sekolah dasar di provinsi Papua mengalami penurunan pada tahun 2018 - 2019. Sebelumnya angka kelulusan jenjang pendidikan sekolah dasar di provinsi Papua terlihat mengalami penurunan, pada tahun 2015 angka kelulusan sekolah jenjang pendidikan sekolah dasar sebesar 98,60 persen, lalu pada tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan hingga menjadi 73,07 persen (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, 2020).



Sumber : BPS Provinsi Papua (2020)

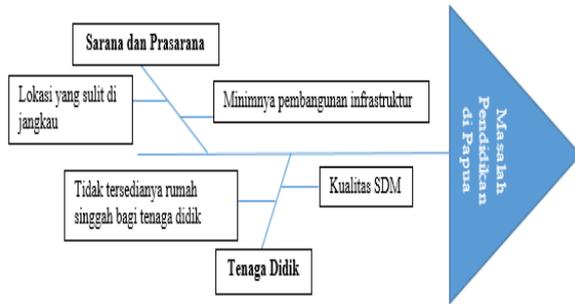
Gambar 1 Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Prov. Papua

Masalah pendidikan di Papua sendiri salah satunya dari minimnya sumber daya guru atau tenaga pengajar yang mana tingkat ketidakhadiran guru di Papua mencapai rata-rata 82%, dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa guru-guru tersebut absen atau tidak aktif dalam kegiatan belajar mengajar yaitu dikarenakan para guru tersebut merasa tidak betah untuk mengajar di Papua serta jarak sekolah dan tempat tinggal guru sangatlah jauh seperti guru-guru di daerah pegunungan tengah Papua terutama di kabupaten Jayawijaya dan kabupaten Lanny jaya yang mana guru harus menempuh perjalanan sekitar 10 km untuk mengajar selain itu juga terkait urusan kesejahteraan, termasuk urusan pangkat berkala dan gaji. sehingga hal inilah yang membuat guru-guru tersebut tidak betah mengajar di daerah Papua (Junianti & Marampa, 2018).

Berikut adalah diagram fishbone identifikasi permasalahan pendidikan di Papua.

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh



Gambar 2 Fish Bone Masalah Pendidikan di Papua

Dalam diagram fishbone di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pendidikan di Indonesia Timur termasuk juga Provinsi Papua adalah ketersediaan tenaga didik dan sarana prasarananya. Hal ini dikarenakan karena kualitas SDM tenaga didik kurang kompeten dan tidak tersedianya rumah singgah bagi tenaga didik itu sendiri. Kemudian, sarana dan prasarana yang kurang memadai itu disebabkan oleh lokasi dari sekolah yang sulit dijangkau karena minimnya pembangunan infrastruktur. Selain sumber daya guru atau tenaga pengajar, minimnya sarana dan pra sarana bagi pengajar atau siswa untuk melaksanakan aktifitas belajar mengajar, minimnya Pembangunan Infrastruktur juga menjadi masalah pendidikan di Papua. Hal ini dapat dilihat dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan dasar yang salah satu indikatornya, adalah sekolah yang bisa dijangkau siswa dengan berjalan kaki dari rumah. Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maksimal 3 kilometer, akan tetapi faktanya menurut data Potensi Desa (Podes) 2019 memperlihatkan masih ada ribuan desa/kelurahan di Papua yang fasilitas pendidikan dasarnya tak memenuhi SPM. Nyaris 30 persen SD di Papua sulit diakses. Untuk mencapainya siswa harus menempuh jarak lebih dari 3 kilometer (Maharrani, 2021).



Gambar 3 SD diluar Jangkauan di Prov. Papua (sumber : lokaldata)

Dalam hal ini, siswa kesulitan untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain karena akses jalan raya serta transportasi yang masih sangat terbatas terlebih lagi pada daerah yang berada di wilayah pedesaan dan pulau yang terpencil. Jarak antara rumah dan sekolah yang jauh tersebut mengakibatkan siswa membutuhkan waktu yang panjang untuk menuju sekolah apalagi tanpa dukungan transportasi dan jalan raya yang memadai .

Alternatif yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Masalah Pendidikan di Papua

Upaya yang telah dilaksanakan pemerintah sebenarnya sudah tertuang dalam regulasi yaitu pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur secara tegas proporsi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total anggaran yang ada, baik dari APBN maupun APBD agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di setiap daerah. Namun, pada kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan (Hamadi, 2021).

Guna mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan di Papua, alternatif yang dapat dilakukan adalah program percepatan bidang pendidikan Provinsi Papua yang dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Program percepatan pada bidang pendidikan yang mencakup antara lain sarana prasarana, kekurangan guru, maupun hal lain yang belum

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

memadai. Kedepannya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Papua wajib memprioritaskan percepatan pembangunan infrastruktur maupun pengadaan Sumber Daya Manusia. Anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN per tahunnya, baik itu yang diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, perlu mendapat perlakuan khusus ketika dialokasikan ke Papua. Selain itu, pemanfaatan dana otonomi khusus sektor pendidikan juga mendapat alokasi 30% dari dana otsus (*Laporan Kunjungan Kerja Komisi I, 2016*).

Yang diinginkan Pemerintah Papua antara lain adalah agar anggaran pendidikan bagi Papua ada perlakuan khusus. Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang tepat untuk Papua terkait infrastruktur, SDM, atau lainnya. Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan yang tepat, dengan langsung melihat ke lapangan. Tidak perlu ada payung hukum lagi untuk masalah perlakuan khusus kepada Papua. Adanya Orsus Papua, hal itu sudah mendukung, yang dibutuhkan adalah ketajaman implementasi berbagai kebijakan program percepatan itu (*Laporan Kunjungan Kerja Komisi I, 2016*).

Pemerintah Provinsi Papua telah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan kompetensi guru, maka para guru bisa mengajar dan membimbing anak didik dengan baik. Dengan adanya peningkatan kualitas guru tersebut telah memberikan manfaat, seperti sebagian besar sekolah sekolah di Papua sudah bisa melakukan ujian sekolah berbasis komputer seperti sekolah lain di Indonesia.

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka kami menyimpulkan bahwa pendidikan yang ada di Papua terjadi ketimpangan atau tidak adanya pemerataan dengan pendidikan lainnya, permasalahan pendidikan yang terjadi di Papua ini harus segera diatasi agar tidak terjadi lagi penurunan minat siswa dalam bersekolah. Hal ini terjadi karena program pemerintahan yang kurang direlaksikan

dan adapun realisasinya tetapi tidak selalu konsisten, dan hal ini pun berpengaruh kepada kedudukan guru dan sarana prasana sekolah yang ada di papua. Tetapi jika program pemerintah selalu berfokus dan selalu konsisten pada program pendidikan yang di Papua maka permasalahan pada pendidikan yang ada dipapua akan segera teratasi serta akan terjadinya penurunan siswa yang putus sekolah di Papua.

Saran

1. Bagi pemerintahan
 - a. Hasil penelitian ini menjadi dasar untuk dapat membentuk kualitas pendidikan meliputi minat sekolah siswa, sarana prasana, dan kedudukan seorang guru.
 - b. Dalam rangka pemerataan pendidikan yang ada di Papua maka perlu meningkatkan program-program pemerintahan yang konsisten dalam mendukung pemerataan pendidikan yang ada di papua.
 - c. Untuk meningkatkan pembangunan pendidikan disarankan agar peneliti selanjutnya dapat menambah variable tertentu yang dapat memediator antara variable atara pembangunan pendidikan, sarana prasana, tenaga pendidik yang ada di Papua.

2. Bagi praktisi

Perlu adanya peningkatan program pemerintah yang sesuai dengan kondisi pendidikan yang ada dipapua, sehingga akan terjadinya pemerataan yang berkualitas pada pembangunan pendidikan yang ada di Papua.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. (2020). *Infografis Pembangunan Prrovinsi Papua*. 77. <https://bappeda.papua.go.id/file/456182342.pdf>
- Hamadi, H. Y. (2021). *Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan di Papua*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=kWsjEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=kebijakan+pendidikan+di+papua&ots=XR7AONHmJ_&sig=t1fe7gQ_BduZY8keBgSJXPmQ8aE
- Hermansyah, A. K., Sumarsono, A., & ... (2020).

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Motivasi Tenaga Pengajar Di Pedalaman Papua Dalam Mengajar dan Melanjutkan Studi pada Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Sebuah Kajian *Dasar: Kajian Teori* <http://journal2.um.ac.id/index.php/sd/article/view/12339>
- Junianti, T., & Marampa, R. (2018). Artikel ini merupakan tugas akhir mata kuliah WSBM kelas Kesmas C FKM Universitas Hasanuddin 2018. *Teknologi Pembuatan Kapal Pinisi Kabupaten Bulukumba*, 7(1), 13.
- Kemendikbud. (2018). Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat. In *Teknologi Pembuatan Kapal Pinisi Kabupaten Bulukumba* (Vol. 7, Nomor 1).
- Laporan Kunjungan Kerja Komisi I. (2016). <http://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-12-4c5506afb18312bfef206cca00a5e162.pdf>
- Maharrani, A. (2021). Pendidikan di Papua: Untuk mengakses saja sulit. In *Lokadata*. <https://kanaldesa.com/artikel/pendidikan-di-papua-untuk-mengakses-saja-sulit>
- Pribadi, R. E. (2017). Implementasi sustainable development goals (sdgs) dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua. In *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*. <https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id>. [https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal Roy Eka Pribadi \(08-11-17-01-04-46\).pdf](https://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/eJournal_Roy_Eka_Pribadi_(08-11-17-01-04-46).pdf)
- Yeimo, A. M. (2017). Pokok Permasalahan Pendidikan Masa Kini di Papua. In *Suara Papua*. <http://suarapapua.com/2016/05/16/pokok-permasalahan-pendidikan-masa-kini-di-papua/>